

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan Al-Hadith Serta Contoh Aplikasinya)

Abdullah Sadiq

Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)

Sulhawi Rubba

Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafa'

Soeparno Hamid

Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru Psikologi Spiritual

Khodijah

Studi Agama dan Lintas Budaya

Nur Syam

Busana Wanita Karir Muslimah

Juwariyah Dahlan

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Bambang Subandi

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan Al-Ḥadīth Serta Contoh Aplikasinya)**
Abdullah Sadiq (108-124)
- **Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)**
Sulhawi Rubba (125-139)
- **Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafā'**
Soeparno Hamid (140-152)
- **Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru Psikologi Spiritual**
Khodijah (153-163)
- **Studi Agama dan Lintas Budaya**
Nur Syam (164-175)
- **Busana Wanita Karir Muslimah**
Juwariyah Dahlan (176-194)
- **Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam**
Bambang Subandi (195-205)

INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bambang Subandi¹

Abstract: The main investment activity is to obtain capital and to develop it. The capital is collected from society's savings produced by entrepreneurial efforts. Successful business provides larger vacancies. Reducing the number unemployment, a country will get significant economic growth. Income will be distributed evenly if investment is given to small and medial companies. Entrepreneurship was promoted by the prophet Muhammad SAW in developing economic policy when he built Madinah. Having high business ethics and spirit, Madinah community obtained their economic welfare.

Kata Kunci: Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ekonomi Islam

¹ Penulis adalah Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Sejak diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia berupaya keras menumbuhkan investasi dalam negeri dengan cara menumbuhkan kepercayaan kepada publik, terutama dunia internasional, bahwa keamanan di Indonesia telah terjamin. Upaya pemerintah tersebut sering ditanggapi oleh para investor asing dengan sikap *wait and see* (menanti perkembangan berikutnya). Sesungguhnya penduduk Indonesia yang cukup besar serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusianya merupakan lahan yang 'empuk' bagi investor untuk mengembangkan segmentasi pasarnya. Apalagi kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah serta upah buruh yang rendah merupakan peluang bagi investor untuk akumulasi kapitaalnya. Dengan demikian, investasi merupakan strategi yang banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah, rakyat, maupun investor sendiri.

Di beberapa negara, telah teruji bahwa investasi merupakan instrumen yang paling efektif dalam menumbuhkan ekonomi, karena dalam investasi tercipta lapangan kerja, alih teknologi, pembenahan transportasi, mobilitas penduduk, penambahan insentif pajak negara, hingga peningkatan penghasilan penduduk. Pada masa Nabi SAW. investasi menjadi perhatian yang utama dalam membangun negara setelah hijrah ke Madinah. Dengan strategi investasi yang tepat sasaran, Nabi SAW. berhasil membangun masyarakat yang memiliki etos dan etika kerja yang tinggi hingga pemerintahan sesudahnya dpt menikmati kesejahteraan yang melimpah. Tulisan ini hendak menelaah urgensi investasi dalam pertumbuhan ekonomi negara yang kemudian dipaparkan pula bagaimana kebijakan ekonomi Nabi SAW. terkait dengan investasi.

Makna dan Urgensi Investasi

Dalam kamus Ekonomi, Winardi memberikan dua pengertian investasi. Pertama, investasi adalah pembelian saham, obligasi dan barang-barang tidak bergerak, sehingga investasi berbeda dengan spekulasi. Kedua, investasi berarti pembelian alat-alat produksi (termasuk di dalamnya barang-barang untuk dijual) dengan modal berupa uang². Pengertian kedua ini lebih mengarah pada upaya mengembangkan modal

² Winardi, *Kamus Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju, 1998), 271.

dan menciptakan modal baru serta memperluas kegiatan bisnis³. Pengertian ini juga tidak berbeda dengan definisi investasi yang diajukan oleh Potjowinoto yang dikutip oleh Muhammad bahwa investasi adalah menempatkan uang (dana) pada sesuatu (aktiva atau asset keuangan) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang⁴. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa kegiatan pokok investasi adalah mencari modal dan mengembangkan modal. Upaya mencari modal dapat dilakukan dengan mendorong tabungan masyarakat, sedangkan upaya mengembangkan modal dapat diharapkan dari pengembangan bisnis oleh masyarakat.

Secara makro, tabungan masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagaimana dalam teori Harold-Domar⁵. Namun demikian, dorongan tabungan sering terganjal oleh sikap pamer saebagian masyarakat (*demonstrations effect*), sehingga masyarakat terbiasa dalam konsumsi yang berlebihan (*conspicuous consumption*)⁶. Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse yang dikutip Irawan dan Suparmoko. Menurut Nurkse, sifat pamer itu merupakan penghalang bagi perkembangan ekonomi, karena keinginan meniru konsumsi negara-negara maju tidak sesuai dengan pendapatannya yang rendah⁷. Di samping itu,

³ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 20.

⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 95.

⁵ Teori ini dikembangkan oleh Roy Harold dan Efsey Domar. Menurut kedua Ekonom ini, untuk mencapai tingkat modernisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, negara yang sedang berkembang perlu menggairahkan kegiatan investasi dan tabungan yang pada gilirannya akan ikut meningkatkan pendapatan negara. Lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2000), 19.

⁶ Konsep konsumsi yang berlebihan (*conspicuous consumption*) dikemukakan oleh Thorstein Bunde Veblen (1857-1924) dari aliran institusional yang mengkritisi pola konsumsi masyarakat kapitalis Amerika dengan mengajukan teori kesenangan. Menurut teori ini, konsumsi barang-barang mewah secara berlebihan merupakan suatu makna kemampuan reputasi untuk kesenangan orang-orang yang kaya. Lihat Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 131-133.

⁷ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1999), 104.

budaya konsumeris masyarakat juga menurunkan tingkat produktifitas masyarakat yang tentu saja berpengaruh pula pada pendapatan riil masyarakat. Tindakan konsumsi selalu mengarah pada hal yang tidak produktif dan dengan pasti akan mengurangi pendapatan masyarakat. Dengan rendahnya pendapatan masyarakat berarti kemampuan masyarakat untuk menabung juga kecil. Kecilnya tabungan itu juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi yang tinggi.⁸ Padahal, dari tabungan masyarakat itu, para pengusaha dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan modal dalam bisnis mereka. Namun demikian, ada pula teori yang menyatakan bahwa tingginya tingkat konsumsi masyarakat akan mendorong investasi. Asumsinya adalah bahwa antara Rumah Tangga Produksi (RTP) dan Rumah Tangga Konsumsi (RTK) terdapat hubungan yang saling membutuhkan dalam mencapai suatu kemajuan. RTP membutuhkan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill, sedangkan RTK menyediakan semua hal itu. Kemudian RTP akan membayar faktor-faktor produksi tersebut. Faktor-faktor produksi tersebut diolah dan diproses oleh RTP untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang kemudian dijual ke RTK. RTK membayar barang dan jasa ini dengan tenaga belinya. Hal itu berarti tingginya produktivitas di RTP akan diikuti oleh kemakmuran RTK, dan kemakmuran RTK akan mendorong investasi untuk meningkatkan produktifitas di RTP.⁹

Dari kedua teori hubungan antara konsumsi dan produksi tersebut, penulis lebih mengikuti pada teori yang menyatakan bahwa konsumsi yang tinggi tidak dapat meningkatkan investasi, bahkan memperburuk keadaan masyarakat. Bagi ekonomi Kapitalis, masyarakat konsumeris merupakan pangsa pasar yang strategis serta membuka kesempatan untuk melakukan monopoli ekonomi, karena tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan wirausaha secara mandiri. Dalam Islam, konsumsi yang berlebihan merupakan sifat pemborosan yang harus dihindari. Begitu pula, menahan konsumsi secara berlebihan juga termasuk kategori bakhil. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk melakukan pola hidup sederhana serta giat berusaha.

Dorongan wirausaha merupakan upaya membuka lapangan kerja serta menumbuhkan perekonomian sektor riil, terutama dalam memper-

⁸ Rustian Kamaluddin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999), 72.

⁹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1999), 33-34.

kuat posisi kelas menengah. Kekuatan masyarakat kelas menengah akan menopang posisi masyarakat sipil dalam demokrasi politik dan ekonomi. Selain itu, keberhasilan ekonomi kerakyatan juga dapat ditelusuri melalui ekonomi masyarakat kelas menengah. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat kelas menengah senantiasa melibatkan tenaga kerja dari masyarakat bawah, sehingga tetesan pendapatan ke bawah (*trickle down effect*) dan upaya pemerataan pendapatan masyarakat dapat terealisasi. Akan tetapi, faktor yang paling dominan dikeluhkan oleh pengusaha kecil dan menengah adalah kekurangan modal. Bagi mereka, pemberian modal lunak merupakan kesempatan untuk memperluas bisnisnya, bukan penggunaan secara konsumtif, karena mereka telah memiliki mental kewirausahaan yang kuat. Mental wirausaha selalu menghindari hal-hal yang tidak produktif. Oleh karena itu, sasaran investasi yang dapat menumbuhkan dan pemeratakan tingkat pendapatan masyarakat adalah pengusaha kecil dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter.

Perusahaan kecil dan menengah paling banyak menyerap tenaga kerja, karena sedikit dari perusahaan tersebut yang menggunakan peralatan mesin. Ketiadaan mesin itu lebih disebabkan oleh kekurangan modal serta minimnya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan dan merawat mesin tersebut. Dengan keterbatasan alih teknologi, perusahaan kecil dan menengah cenderung menghasilkan produktivitas yang rendah dengan biaya yang relatif tinggi. Akhirnya kekalahan dalam persaingan usaha dengan perusahaan besar tidak dapat terelakkan. Oleh karena itu, investasi untuk pengembangan usaha bagi perusahaan kecil dan menengah sangat dibutuhkan, terutama investasi finansial dan manajerial.

Investasi yang berorientasi pada penciptaan tenaga kerja yang biasanya terjadi pada pengusaha sektor informal, seperti perusahaan kecil dan menengah, telah mendapat perhatian dari Organisasi Buruh Internasional (ILO). Dalam misi kunjungan dan studinya di beberapa negara, seperti Kolombia, Kenya, dan Sri Lanka, ILO menyimpulkan bahwa penerapan teori pembangunan pertumbuhan di negara-negara tersebut selain mencapai pertumbuhan, juga pada saat yang sama naiknya angka pengangguran. Atas dasar itu, ILO menekankan pada peningkatan

tersedianya modal bagi sektor informal dan mengkonsentrasikan pada pembelanjaan dan kegiatan penciptaan lapangan kerja.¹⁰

Di negara-negara yang sedang berkembang, strategi investasi dalam bentuk peminjaman modal oleh pemerintah banyak lebih ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Di antara alasannya adalah penggunaan modal oleh perusahaan kecil dan menengah banyak digunakan untuk keperluan konsumtif. Di samping itu, persyaratan administrasi kredit diterapkan secara birokratis dan rumit untuk perusahaan kecil dan menengah, sementara bagi kebanyakan perusahaan besar pemenuhan persyaratan itu tercapai dengan praktek kolusi dan penyuaipan kepada aparat pemerintah. Kemudahan ini memberi peluang monopoli bagi perusahaan besar dan mematikan perusahaan kecil dan menengah.

Menurut data 1-0 tahun 1995, dinyatakan bahwa marjin perdagangan eceran yang dikuasai rakyat kecil hanya 20,2 triliun rupiah, sedangkan perdagangan partai besar yang dikuasai segelintir orang berjumlah 59,3 triliun rupiah. Di Jepang, perbedaan antara marjin perdagangan eceran dengan perdagangan partai besar hanya terpaut sedikit. Di Amerika, kondisinya justru terbalik: porsi perdagangan pengecer lebih tinggi daripada perdagangan partai besar.¹¹

Perhatian pemerintah kepada perusahaan kecil dan menengah merupakan strategi utama pengembangan ekonomi kerakyatan. Melalui peran perbankan, pemerintah memberlakukan kebijakan kredit lunak dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil dan menengah sebagai insentif investasi. Namun, menurut Indra Ismawan, kenyataan yang muncul adalah kekhawatiran pihak bank dalam menyalurkan kredit untuk pengusaha kecil, sehingga kredit yang disalurkan sangat minim dan terbatas, serta mengenakan selektivitas yang tinggi. Selain itu, hubungan antara bank dan pengusaha lebih sebagai hubungan kreditur-debitur, bukan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.¹² Dengan demikian, kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat sasaran.

¹⁰ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 62-63.

¹¹ I.B. Wirawan, Sukidin, dan Basrowi, *Perencanaan dan Strategi Pembangunan* (Jember: Jember University Press, 2001), 124.

¹² Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah* (Jakarta: Grassindo, 2001), 53-58.

Investasi sebagai instrument pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat digunakan untuk pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi dapat terwujud bila investasi ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja dengan keberpihakan pemerintah dalam regulasi dan pembinaan. Reorientasi investasi dari usaha skala besar dan proyek terpusat menjadi investasi yang berhubungan langsung dengan orang miskin, seperti pendidikan, kesehatan, kredit modal usaha, dan sebagainya, adalah *inheren* dengan gagasan *redirecting investment* yang dikemukakan oleh Chenery di Bank Dunia. Gagasan ini diprediksikan akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan orang miskin yang pada gilirannya meningkatkan seluruh anggota masyarakat.¹³

Investasi dalam Ekonomi Islam

Jika investasi memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan makro ekonomi, maka kebijakan investasi adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menggalakkannya. Tentu saja tidak semua investasi dibenarkan oleh Islam, tetapi hanya investasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan shari'ah Islam (*al-aṣl fī al-ashya' al-ibāḥah hattā yakūn al-dalīl 'alā tahrīmih*).¹⁴ Investasi yang dilarang dalam Islam adalah investasi yang mengandung riba, perjudian, penipuan, dilakukan dengan informasi yang menyesatkan, bukan menjadi pemiliknya secara sempurna, membawa bahaya, komoditinya haram, dan merusak moral. Sebaliknya, pemerintah juga harus menindak individu atau kelompok yang mengancam eksistensi investasi. Dalam hal ini, Nabi SAW. pernah mengecam tindakan yang tidak memiliki motivasi produktif dengan memberikan sebuah ilustrasi, "Seseorang yang menjual sebuah rumah (tanpa kebutuhan) dan ia tidak menginvestasikan hasilnya untuk sesuatu yang sama, maka Tuhan tidak akan memberkati hasil penjualannya itu (*man bā'a dāran thumma*

¹³ Mansour Fakhri, *Sesat Pikir*, 64.

¹⁴ Dalam persoalan mu'amalah, investasi dan bisnis termasuk di dalamnya, apapun bentuk kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan dua hal. Pertama, tujuan sharia'ah (*maqāṣid al-shari'ah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Kedua, ruh shari'ah, yaitu kemashlahatan individu dan umat (*lā ḍarār wa lā ḍirār*). Tolok ukur untuk hal ini dapat diketahui melalui esensi dan sebab-akibat (*ta'līl*) dari suatu kegiatan mu'amalah (*al-ḥukm yadūr ma'a al-'illah wujūdān wa 'adaman*).

lam yaj'al thamānahā fī mithlihā lam yubārak lahū fihā).¹⁵ Demikian pula, Nabi SAW. juga memuji sikap orang yang melakukan investasi sebagaimana dalam riwayat Muslim, "Tak seorang muslim pun yang menanam pohon, kecuali ia akan mendapatkan sedekah dari apapun yang memanfaatkannya" (*mā min muslim yaghriṣ gharsan illā kāna mā akala lahu ṣadaqah*).¹⁶

Dalam sejarah Islam, investasi merupakan kebijakan pertama pemerintahan Nabi SAW. di Madinah dengan mendorong kemitraan dalam perdagangan dan pertanian antara sahabat Muhājiriin dan Anṣār serta mendorong masyarakat untuk senantiasa meningkatkan modal dan tabungan. Menurut Karim al-Sadr, ada dua cara yang diwujudkan Nabi SAW. Dalam menginvestasikan tabungan masyarakat. Pertama, mengembangkan peluang investasi yang *shar'i* secara legal. Kedua, mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk yang tidak islami.¹⁷ Kedua strategi investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

"Pengembangan peluang investasi islami secara legal dilakukan dengan mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan sehingga pihak surplus (pemegang tabungan) dan *enterpreneur* dapat bekerja sama dengan *ex-ente agreement share* yang menghasilkan nilai tambah. Karena kegiatan utama ekonomi adalah jasa, agrikultural, perdagangan, dan kerajinan tangan, maka bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan ini adalah *muḍarabah*, *muzāra'ah*, dan *mushārahah*. Tabungan yang dimiliki masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan aset fisik, seperti tanah, mesin, dan lain-lain, digunakan untuk agrikultural. Atas dorongan dan bimbingan Nabi SAW., kaum Muhājiriin dan Anṣār siap untuk bekerja sama dengan pembagian kepemilikan 50%:50%. Mengingat kaum Muhājiriin yang 'kurang' dalam hal modal dan skill yang menyangkut agrikultural dan perdagangan, bagian kepemilikan yang mereka terima tidak sesuai dengan nilai partisipasi yang mereka kontribusikan. Melalui kontrak kerja sama ini,

¹⁵ Jalāl al-Dīn Al-Sayūfi, *al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, Jilid II (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), 127.

¹⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 27.

¹⁷ Karim al-Sadr, "Uang dan Kebijakan Moneter pada Periode Awal Islam" dalam Adiwarmān Azwar Karim (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ter. Tim IIIT (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 133.

kaum Anṣār mengajarkan skill yang dibutuhkan, sehingga produktifitas meningkat¹⁸

Sebagai masyarakat pribumi, sahabat Anṣār lebih banyak berperan sebagai pemilik modal atau tuan tanah, sementara sahabat Muhājiriṅ yang merupakan pendatang dari Makkah dengan meninggalkan semua kekayaannya menjadi pengelola modal atau pengelola tanah.¹⁹ Di sektor pertanian, Nabi SAW. mengambil kebijakan untuk menghidupkan tanah yang tidak digarap. Alternatif yang ditawarkan adalah sistem sewa bagi hasil dengan pembayaran tunai. Di sektor perdagangan dan industri, kemitraan diterapkan adalah *mushārahah* dan *muḍārahah*. Di Madinah, Nabi SAW. juga mendirikan pasar untuk menyaingi pasar Yahudi Bani Qaynuqa' yang terkenal dengan kecurangan dan riba. Dalam pasar Madinah tersebut, Nabi SAW. memberlakukan etika bisnis Islam, sehingga pasar tersebut mengungguli pasar kaum Yahudi, karena banyak pedagang yang datang untuk melakukan transaksi.

Selain itu, etos kerja sahabat Muhājiriṅ dan Anṣār juga tinggi. Sebagian kaum Anṣār adalah berasal dari negeri Yaman yang terkenal keuletan dalam berdagang, sedangkan kaum Muhājiriṅ banyak yang berasal dari suku Quraysh yang memiliki watak pebisnis. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh sahabat Anṣār dan Muhājiriṅ, investasi mampu memperluas pasar tenaga kerja dalam berbagai sektor. Al-Khuzā'i, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Zaky al-Kaaf dari Muhammad Shubayh, mengemukakan bahwa tidak kurang dari 156 usaha bisnis yang menggerakkan perekonomian umat Islam pada zaman Nabi SAW. Beberapa usaha bisnis yang menonjol antara lain : (1) pembuatan kayu dan segala barang besi, (2) perusahaan tenun, (3) perusahaan kayu, (4) pembuatan meriam dari kayu, (5) perhiasan-perhiasan, (6) arsitektur rumah, (7) alat-alat timbangan, (8) alat-alat berburu, (9) perusahaan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Modal adalah harta milik pribadi, karenanya ia menjadi obyek zakat. Logikanya modal diproduksi dan dikembangkan agar dapat dinikmati oleh semua orang. Jika tidak bisa diproduksi, maka pemilik modal perlu orang lain yang memiliki keahlian dalam mengembangkan modal dengan kerja sama kemitraan. Tentu saja pengembangan modal tersebut tidak terlepas dari resiko kerugian. Untuk itu, alternatif bagi orang yang menghindari resiko tersebut adalah meminjamkan modal kepada orang lain tanpa kompensasi bunga. Dengan demikian, pengembangan modal berarti memperlancar arus transaksi usaha yang tidak langsung menopang makro ekonomi.

perkapalan, (10) kedokteran, (11) penerjemahan, dan (12) kepandaian kesenian.²⁰

Dengan penggalakan investasi, dorongan bekerja dan menabung, serta anjuran kemitraan bisnis, pertumbuhan perekonomian dan produktifitas meningkat secara signifikan, sehingga pendapatan per kapita masyarakat juga ikut meningkat, meskipun pada saat itu juga sering terjadi peperangan yang secara ekonomis menyedot pendapatan negara. Keberhasilan ini ditulis oleh Kadim al-Sadr sebagai berikut²¹,” Setelah beberapa tahun pasca hijrah, kaum Muhājiriīn sudah mempunyai tempat tinggal, pekerjaan, dan standart kehidupan yang bagus. Peningkatan kesejahteraan ini di satu sisi menyebabkan pembayaran zakat oleh kaum muslim menjadi wajib, karena pendapatan perkapita mereka telah melebihi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan runah tangga”.

Kemakmuran umat Islam ini berpuncak paada masa khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. paada masa ini, setiap orang memiliki hak tunjangan sosial dari negara yang masing-masing bagiannya ditentukan berdasarkan paartisipasinya daalam pengembangan Islam serta kedekatannya dengan Nabi SAW. Keadaan ini hampir menyurutkan minat sebagian besar umat Islam untuk berwirausaha, karena mereka telah sejahtera meskipun tanpa bekerja. Hal ini dijumpai oleh khalifah ‘Umar tatkala melihat bahwa kebanyakan orang-orang yang bemiaga di pasar adalah orang-orang non muslim dan orang awam. Akhirnya ‘Umar menegur para sahabat agar tetap bekerja. Beberapa orang berkata kepada ‘Umar, “Tapi Tuan, Allah telah menaklukkan untuk kita banyak negara dan harta rampaasaan perang telah sampai ke tangan kita demikian banyaknya. Ini menyebabkan kita tidak perlu lagi bemiaga untuk memenuhi keperluan”. ‘Umar menjawab,” Jika kamu ingin melakukannya dan meninggalkan pemiagaan sebagai tanggung-jawab, kamu akan mendapatkan bahwa kaum lelaki kamu akan bergantung pada kaum lelaki mereka, dan kaum perempuan kamu akan bergantung pada kaum perempuan mereka”.²²

Pistiwa di atas menunjukkan bahwa investasi masih diperlukan meskipun kemakmuran negara telah tercapai. Investasi merupakan

²⁰ Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002),114.

²¹ Kadim As-Sadr, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 73.

²² Adiwarnan Azwar Karim, *Ekonomi Islam Sutrau Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 49.

penopang utama perekonomian negara, baik investasi oleh perusahaan domestik maupun dari perusahaan multinasional. Bagi negara yang sedang berkembang, investasi modal asing lebih diperlukan mengingat keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam. Alih teknologi dan penyerapan tenaga kerja merupakan harapan besar negara sedang berkembang dari investasi. Namun demikian, seringkali investasi di negara sedang berkembang tidak ditujukan pada tepat sasaran. Hasil investasi tersebut banyak digunakan oleh negara-negara Islam, khususnya negara Arab, untuk memperkuat pertahanan militernya dibanding untuk kesejahteraan masyarakatnya. M. Dawam Rahardjo menengarai hal itu lebih didorong oleh pemahaman pada penggunaan modal (*amwāl*) untuk jalan Allah (*fī sabīl Allāh*), karena terdapat solidaritas keagamaan dan kesukuan yang kuat atas penindasan yang dilakukan bangsa Israel maupun bangsa Barat terhadap negara-negara Arab, seperti Palestina.²³

Penutup

Investasi yang diterapkan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan tidak saja memberikan pertumbuhan ekonomi yang berarti, tetapi juga meratakan pendapatan masyarakat secara signifikan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi akan lebih efektif jika diikutsertakan dalam proses investasi. Hanya saja pembinaan kepada mereka tidak cukup dengan memberikan modal kerja, namun yang lebih penting adalah pembinaan mental wirausaha, manajerial, bahkan pembinaan spiritual.

Karena investasi dapat diarahkan pada transaksi yang haram atau pada komoditi yang dilarang, maka bagi IAIN Sunan Ampel, terutama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih intensif pada masyarakat agar terhindar dari investasi yang haram, selain menumbuhkan jiwa wirausaha yang ulet sebagai modal pembangunan ekonomi sebagai yang dikemukakan oleh Schumpeter maupun David McClelland.

²³ M. Dawam Rahardjo, "Orientasi Pembangunan di Dunia Islam" dalam Amrullah Achmad (et.al.) *Islamisasi Ekonomi* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 91-92